

## Keefektifan Program Keluarga Harapan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat

<sup>1</sup>Mohammad Mudjib Mustain, <sup>2</sup>Hari Purnomo, <sup>3</sup>Junaedi  
<sup>1</sup>gus.mmr@gmail.com, <sup>2</sup>harihp@undar.ac.id, <sup>3</sup>junaedi.fps@undar.ac.id  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Darul 'Ulum

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), kesejahteraan dan Peningkatan Kesejahteraan Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jombang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan objek dalam penelitian ini adalah Tingkat Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jombang dengan pendekatan kualitatif, Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Jombang dengan 86.000 KPM (Kader Pembangunan Manusia) di 306 desa/kelurahan. Waktu Penelitian adalah Januari – April 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jombang tahun 2021 terindeksi baik dengan bukti adanya gradiasi per tahun pada PKM-PKH 2. Ada peningkatan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jombang dilihat dari pengeluaran kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk.. 3. Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jombang dalam tinggi karena menurunkan kemiskina 10% pada tahun 2021

Kata kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

### PENDAHULUAN

Pemerintah lewat Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH sendiri merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sejak tahun 2007. Pemerintah melaksanakan PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai Program Perlindungan Sosial internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT).

PKH merupakan program bantuan bersyarat yang diperuntukan kepada Keluarga Miskin (KM). Dengan adanya PKH, Keluarga Miskin (KM) didorong untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan juga pendampingan. Misi PKH adalah menurunkan tingkat kemiskinan, mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bertambah. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Keluarga Miskin (KM) ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. dengan besaran Bansos PKH per tahun 2021 (Ninggar, 2021) :

1. Ibu Hamil/Nifas menerima sebesar Rp. 3.000.000 per tahun
2. Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun menerima sebesar Rp. 3.000.000 per tahun
3. Pendidikan Anak SD/Sederajat menerima sebesar Rp. 900.000 per tahun

4. Pendidikan Anak SMP/Sederajat menerima sebesar Rp. 1.500.000 per tahun
5. Pendidikan Anak SMA/Sederajat menerima sebesar Rp. 2.000.000 per tahun
6. Penyandang Disabilitas berat menerima sebesar Rp. 2.400.000 per tahun
7. Lanjut Usia menerima sebesar Rp. 2.400.000 per tahun

Di Kabupaten Jombang tahun 2020 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah 86.000 KPM (Kader Pembangunan Manusia) di 306 desa/kelurahan di kabupaten Jombang dari prediksi penduduk miskin berjumlah 125.940 atau hanya 68,3 % yang terimbas PKH.

Secara umum, permasalahan implementasi PKH di Kabupaten Jombang diidentifikasi oleh beberapa hal, yaitu kurangnya sosialisasi dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH), lambatnya penyaluran dana PKH kepada peserta, dana PKH yang diberikan tidak cukup untuk biaya sekolah anak, adanya kesalahan memfungsikan dana PKH yang diberikan kepada RSTM (rumah tangga sangat miskin) untuk hal-hal tidak dianjurkan dalam program PKH. Selain itu permasalahan lain adalah kurang tepat sasaran dalam melakukan pendataan RSTM sebagai penerima manfaat PKH, akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH belum dipandang meningkat status kesehatan dan gizinya terhadap ibu hamil, ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan Anak Pra Sekolah Anggota RSTM.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Program keluarga harapan adalah merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin (RTSM), yaitu program pemerintah yang tertuang dalam RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Tahun 2005 s/d 2025 (Undang-Undang No. 17 Tahun 2007). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Tujuan PKH (program Keluarga Harapan) Menurut Kementerian Sosial (2016), tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka waktu panjang. Tujuan khusus PKH adalah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan peserta PKH, mengarahkan perubahan perilaku positif tentang pentingnya kesehatan, pendidikan dan pelayanan yang memastikan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jombang dilakukan dengan :

1. Proses Penetapan Sasaran (Targeting)
2. Penetapan lokasi penerima Program Keluarga Harapan
3. Proses Persiapan Pertemuan Awal dan Validasi
4. Penyaluran Bantuan
5. Pembentukan Kelompok Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
6. Penangguhan dan Pembatalan
7. Pemutakhiran Data
8. Pengaduan Peserta PKH

Peningkatan Kesejahteraan keluarga adalah proses atau cara untuk meningkatkan usaha, peningkatan merupakan suatu proses dimana proses memberikan hasil terhadap usaha yang dilakukan seseorang lebih meningkat dengan keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan-hambatan yang serius di dalam lingkungan keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk diatasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud. Dimensi kesejahteraan keluarga sangat luas dan kompleks. Taraf kesejahteraan tidak hanya berupa ukuran yang terlihat (fisik dan kesehatan) tapi juga yang tidak dapat dilihat (spiritual). Indikator kesejahteraan Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2002) menggunakan 23 indikator keluarga sejahtera. Tujuan dari penelitian ini adalah Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), kesejahteraan dan Peningkatan Kesejahteraan Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jombang.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan objek dalam penelitian ini adalah Tingkat Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jombang dengan pendekatan kualitatif, Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Jombang dengan 86.000 KPM (Kader Pembangunan Manusia) di 306 desa/kelurahan. Waktu Penelitian adalah Januari – April 2022.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengecekan keabsahan temuan menggunakan teknik yang dikemukakan Hijriah Julianda, 2013.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Kegiatan Prioritas Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam penuturan Bapak Muhammad Nasrudin, STKoordinator PKH Kabuapten Jombang pada tanggal 28 Pebruari 2022 mengatakan bahwa komplementaritas Program Keluarga Harapan PKH sebagai program perlindungan sosial yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup dasar masyarakat miskin dengan penargetan programprogram jaminan dan perlindungan sosial lainnya. Program-program tersebut antara lain:

#### a. Jaminan Kesehatan Nasional

Seluruh peserta PKH pada saat yang bersamaan juga adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Lebih dari itu, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas meliputi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bayi yang lahir dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini tidak dijamin.

#### b. Beras untuk Masyarakat Sejahtera (Rastra)

Seluruh penerima PKH berhak menjadi penerima bantuan beras bersubsidi (Rastra) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota keluarga. Rastra diberikan sebanyak 15 Kg/bulan dengan harga tebus Rp.1.600/Kg.

#### c. Program Indonesia Pintar (PIP)

Peserta PKH dengan usia 6-21 tahun berhak menjadi penerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar, yang bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 tahun.
- 2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- 3) Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Prioritas sasaran dari penerima Program Indonesia Pintar adalah:

- 1) Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2019 adalah Pemegang KKS yang ada dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- 2) Siswa/anak dari keluarga pemegang KKS yang belum menerima BSM 2019;
- 3) Siswa/anak dari keluarga peserta PKH non KKS;

- 4) Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan;
- 5) Konflik sosial, siswa dari keluarga terpidana, anak berada di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), dan siswa memiliki lebih dari tiga saudara tinggal serumah;
- 6) Siswa dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis dan Agroteknologi) Perikanan, Peternakan, kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Siswa/anak yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:

**Siswa Pendidikan Formal:**

- 1) Terdaftar sebagai siswa/peserta didik pada sekolah;
- 2) Terdaftar dalam Dapodik sekolah;
- 3) Diusulkan oleh sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemdikbud

**Anak Didik Lembaga Pendidikan Non-Formal:**

- 1) Terdaftar sebagai anak didik pada SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan;
- 2) Diusulkan oleh SKB/PKBM/Lembaga kursus dan pelatihan melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemdikbud;

**Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah:**

- 1) Terdaftar kembali di sekolah/SKB/PKBM/Lembaga kursus dan pelatihan.
- 2) Diusulkan oleh sekolah/SKB/PKBM/Lembaga kursus dan pelatihan melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemdikbud.

**d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

KUBE merupakan kelompok warga yang dibentuk dengan tujuan melaksanakan kegiatan ekonomi bersama. Peserta PKH diharapkan menjadi penerima bantuan KUBE dengan tujuan meningkatkan penghasilannya.

Pemerintah kabupaten Jombang, melalui Dinas Sosial Kabupaten Jombang memberikan bantuan kepada kelompok usaha bersama ( Kube).Sebanyak 1500 kpm penerima bantuan sosial kube yg terdaftar dalam 150 kelompok pada tahun 2021. Dimana masing masing anggota menerima bantuan sebesar 1 juta rupiah yg mana KPM PKH yang mendapatkan bantuan stimulan tersebut adalah KPM PKH yang memiliki usaha dan yang graduasi di tahun 2021. (Wawancara dengan ibu Anita Rahmawati, Kasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial, Dinsos Jombang pada tanggal 13 April 2022)

**e. Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu)**

Rutilahu adalah program bantuan perbaikan rumah yang diharapkan dapat menjangkau peserta PKH termasuk perbaikan fasilitas lingkungan tempat tinggal.

**f. Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut)**

Aslut merupakan bantuan sosial berupa uang serta pendampingan bagi lanjut usia. Penerima PKH yang memiliki lanjut usia 70 tahun ke atas diberikan bantuan sosial sebagai penerima PKH komponen kesejahteraan sosial..

**g. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)**

ASPDB merupakan bantuan sosial berupa uang serta pendampingan bagi penyandang disabilitas berat. Anggota keluarga penerima PKH yang merupakan penyandang disabilitas berat diberikan bantuan sosial sebagai penerima PKH komponen kesejahteraan sosial.

Dalam memaksimalkan tujuan dalam prioritas PKH di Kabupaten Jombang, diadakan pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session (FDS)*. Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Sri Utami, SE., MM, Kasubag. Penyusunan Program Dan Evaluasi dinas Sosial Kabupaten Jombang pada tanggal 7 Maret 2022, sebagai berikut :

Bahwa KPM secara berkelompok melakukan pertemuan secara berkala bersama pendamping PKH yang ditunjuk langsung oleh Dinas Sosial di Kabupaten Jombang. Pendamping PKH dapat dikategorikan sebagai pendamping sosial karena berperan sebagai fasilitator. Dilaksanakannya P2K2 sebagai FDS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Peserta PKH tentang pentingnya kesehatan dan pendidikan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup anggota keluarga di masa depan. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban P2K2 oleh Peserta PKH tidak semata pemenuhan kewajiban sebagai penerima PKH, namun juga karena adanya kesadaran penerimaan manfaat yang diterima baik manfaat dalam bidang pendidikan dan manfaat dalam bidang kesehatan bagi anak dalam keluarga Peserta PKH.

Salah satu indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan prioritas PKH adalah terjadinya gradiasi. Graduasi merupakan berakhirnya kepesertaan sebagai KPM PKH. graduasi terbagi menjadi dua jenis: Graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan.

1. Graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan. Misalnya:
  - a. Tidak memiliki pengurus kepesertaan;
  - b. Tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan: Kesehatan, Pendidikan atau Kesejahteraan Sosial.
2. Graduasi Sejahtera Mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. Graduasi Sejahtera Mandiri dapat terjadi baik dari inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari Pendamping Sosial atau pihak lainnya. Misalnya:
  - a. KPM menolak bantuan karena merasa mampu, tidak ingin bergantung pada bantuan sosial PKH, dan/atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain;
  - b. KPM mengalami perubahan status ekonomi menjadi sejahtera karena mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik (termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN), memiliki usaha atau kegiatan ekonomi yang berjalan sukses, dan/atau memperoleh harta kekayaan tertentu.

Proses Graduasi bertujuan untuk:

- a. Mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH;
- b. Memastikan penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran;
- c. Meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial; dan
- d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.

## **2. Dampak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**

Dengan pelaksanaan PKH diharapkan dapat meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, dapat meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, meningkatkan angka partisipasi pendidikan wajib belajar 12 tahun, dan mengurangi jumlah pekerja anak. Tujuan akhir PKH diharapkan dapat mengubah sikap dan/atau perilaku pentingnya kesehatan, pendidikan, dan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan generasi mendatang, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan kematian ibu yang melahirkan. Dengan demikian terjadi proses perbaikan kualitas hidup dan peningkatan taraf kesejahteraan keluarga.

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga

Di Kabupaten Jombang penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 154.079 orang dengan perincian penerima bantuan pangan non tunai sebesar 103.083 orang dan bantuan program keluarga harapan (PKH) sebesar 50.996 orang dengan penerima PKH terbesar pada kecamatan Mojowarno sebanyak 4.633 orang dan paling sedikit adalah Kecamatan Megaluh sebanyak 1476 orang.

Dalam Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terhadap KPM PKH Kabupaten Jombang terjadi kenaikan dari tahun 2019 sebesar Rp. 27.908.400.000, - naik menjadi Rp. 33.273.025.000 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 pencairan dana PKH sebesar Rp. 36.396.900.000,- (terlampir). Ini menunjukkan bahwa pendataan terhadap PKH terus di perbarui dan bertambah.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Jombang telah memberikan sumbangan perubahan terhadap penurunan angka kemiskinan di daerah yaitu sebesar 10 (sepuluh) persen. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Drs. Moch Saleh, M.Si, pada tanggal 3 Mei 2022).

Dalam penuturan lanjutan beliau bahwa pada tahun 2017 pertumbuhan komponen konsumsi rumahtangga sebesar 4,79 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 5,03 persen (2018); 5,03 persen (2019); -1,44 persen (2020) dan 3,23 persen (2021). Sementara itu pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita pada masing-masing tahun adalah 4,31 persen (2017); 4,59 persen (2018); 4,59 persen (2019); -5,32 persen (2020) dan 2,43 persen (2021). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumahtangga lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk, dimana rata-rata peningkatan jumlah penduduk per tahun berada pada kisaran 0,4 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2017, setiap rumahtangga di Kabupaten Jombang menghabiskan dana sekitar 75,78 juta Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 82,20 juta Rupiah (2018); 88,32 juta Rupiah (2019); 83,86 juta Rupiah (2020); dan 87,96 juta Rupiah (2021). Sementara itu, atas dasar harga konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumahtangga tumbuh pada kisaran 2 sampai 4 persen, kecuali tahun 2020 yang kontraksi sebesar 5,20 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,88 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” (ADHB) meningkat pada kisaran 7 s.d 8 persen, kecuali tahun 2020 yang “terjun bebas”. Peningkatan tertinggi terjadi tahun 2018 dengan peningkatan sebesar 8,47 persen. Tahun 2019 melambat menjadi 7,14 persen dan tahun 2020 turun sebesar -5,17 persen. Tahun 2021 kembali meningkat, namun belum sebesar tahun 2018 atau 2019, yakni sebesar 2,43 persen.

Sebagaimana yang kita pahami bahwa konsumsi terbesar pelaku ekonomi adalah sektor Rumah Tangga. Ketika sektor Rumah Tangga “terganggu”, hampir bisa dipastikan sektor lainnya juga “terganggu”. Pandemi covid19 memaksa Rumah Tangga untuk menurunkan konsumsinya, utamanya konsumsi sekunder dan tertier. Penurunan konsumsi diakibatkan menurunnya pendapatan rumah tangga dan karena aturan. Perihal tentang aturan, pandemi covid19 memaksa pemerintah untuk membatasi mobilitas rumah tangga, maka konsumsi yang berhubungan dengan mobilitas otomatis terkontraksi, misal konsumsi transportasi, rekreasi dan restoran. Subsektor tersebut terkontraksi cukup dalam. Sebaliknya, konsumsi yang mendukung

aturan pemerintah menjadi tinggi, misal konsumsi komunikasi. Subsektor tersebut tumbuh signifikan. Efek lainnya adalah struktur konsumsi rumah tangga sedikit berubah. Tahun 2021, dimana pandemi covid19 sudah mulai terkendali, maka struktur konsumsi rumah tangga mulai kembali seperti sebelum terjadi pandemi covid19.

Dalam peneltiian ini disimpulkan bahwa ada indikasi kuat bahwa PKH dapat mensejahterakan masyarakat Jombang, akan tetapi kenaiakan peserta PKH berlawanan dengan graduasi PKH dari tahun ke tahun. Ibaratnya tumbang satu tumbuh seribu. Ini menunjukkan adanya kesalahan dalam pendataan oleh para fasilitator pada setiap desa didaerahnya masing-masing, yang belum terlitit dan mengindahakn buku teknik pelaksanaan PKH dari kementerian sosial.

## PENUTUP

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jombang tahun 2021 terindeksi baik dengan bukti adanya gradiasi per tahun pada PKM-PKH
2. Ada peningkatan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jombang dilihat dari pengeluaran kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk.
3. Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jombang dalam tinggi karena menurunkan kemiskina 10% pada tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- AB, Syamsudin. 2018. *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga Fungsionalisme Struktural dan Interaksionisme Simbolik*. Ponorogo: Wade Group..
- Adya Ninggar P, 2021 <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/16/siapa-saja-keluarga-penerima-manfaat-atau-kpm-berikut-kriteria-kpm-penerima-bansos-pkh?page=3>. Diunduh 10-02-2022
- Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010),
- BKKBN, 2002. *Kebijakan Teknis Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Melalui Program KB Nasional*. Jakarta
- Euis Sunarti. 2006. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengemabangan Evaluasi dan Berkelanjutan*. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- indonesiabaik.id
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2016). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. <http://pkh-jogjaistimewa.com>
- Rahayu, S. L. (2012). *Bantuan sosial di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
- Rostiana Endang, Horas Djulius, 2018, *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dala Mewujudkan Keluarga Sejahtera*, Yogyakarta: Diandra Kreatif
- Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010)
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- La Ode Amijaya Kamalussin, Misnawati, A. Hartawati, Rahman, Yusriadi, Rinto Hasiholan Hutapea dan Saidna Zulfiqar Bin-Tahir (2021), *Inhibiting Factors (Internal & External) Implementation of the Family Hope Program (PKH)*. *Proceedings of the 11th Annual*

*International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Singapore, March 7-11, 2021*

- Riska Islamiyah, Moh. Tahir Haning , Andi Rahmat Hidayat (2021) ; *Adaptive Policies in the Family Hope Program (PKH) to achieve Sustainable Development Goals in Pangkep Regency*. Jurnal Internasional JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 7 No. 2, Desember 2021, p. 81-97
- Eceh Trisna Ayuh1, Titi Darmi, Faizal Anwar (2022). *Communication Analysis of Assistance Family Property Programs to Improve The Independence of Beneficiary Families*. Jurnal sinta S-4, Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2022, Volume 8, Nomor 1, p. 18-34
- Lies Kumara Dewi, Eka Ubaya Taruna Rauf, Husna Purnama, Adi Pramana (2022). *Implementation of The Family Hope Program in Poverty Reduction in Cilimus Village Teluk Pandan District Pesawaran Regen*. International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology (IJESET). Vol. 1 No. 2 (2022): April 2022, p.